

**KAJIAN YURIDIS EMPIRIS TENTANG PARTAI POLITIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PARTAI POLITIK  
(Studi Kasus Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Surakarta)**

**BEKTI PRIBADI  
NPM. 18111017**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to examine and analyze the role of DPC PDI struggle of Surakarta city in conducting political education to the community in Surakarta. Reviewing and analyzing the factors that inhibit the DPC PDI struggle of Surakarta city in conducting political education to the community in Surakarta.

The method of approach in writing is sociological juridical. The specification of this research uses analytical descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques using interview and observation studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

In the implementation of political education activities conducted by DPC PDI struggle of Surakarta city involve various circles, such as cadres, young generation and novice voters as well as for regional and prospective leaders and legislative candidates. Socialization and party school activities held. The conclusion that political education has been delivered and implemented in accordance with the legislation, the Pancasila ideology and the vision and mission of the party that wants to be conveyed to the people also cadernya. Factors that inhibit DPC PDI Surakarta City Struggle in implementing political education to the community in Surakarta is a low interest in the community in following political education and limited budget of funds. Therefore, the Government of Surakarta participated in assisting in the problem of funds especially for political education for the community through grant aid to political parties.

Keywords: Political parties, Political education.

**PENDAHULUAN**

Pendidikan politik sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan partisipasi politik masyarakat tanpa harus terjadi *vote buying*. Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. dalam jurnal yang dikutip oleh Neny Agustin Irma Yuningsih mengatakan bahwa: “Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai

pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mengambil keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau kekerasan, legal atau tidak legal, dan efektif atau tidak efektif'. Jika masyarakat kurang paham mengenai pengetahuan politik dan merasa acuh dengan sistem politik dan beranggapan bahwa sistem politik hanyalah urusan bagi pemerintahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat ditipu dengan janji-janji yang disampaikan kandidat pemimpin yang nantinya jika terpilih penerapannya tidak sama dengan apa yang telah dijanjikan pada saat kampanye.

PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup kuat di Kota Surakarta dengan 30 kursi anggota legislatif di DPRD Kota Surakarta periode 2019-2024 dan menjadi Kepala Daerah selama 5 periode berturut-turut yaitu Slamet Suryanto (2000-2005), Joko Widodo (2005-2010 dan 2010-2012), F.X. Hadi Rudyatmo (2012-2015 dan 2016-sekarang). Setiap partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, maka dari itu PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup kuat di Kota Surakarta juga tetap harus mensosialisasikan pentingnya pendidikan politik tersebut.

Setiap partai politik memiliki tanggungjawab sebagai informan bagi masyarakat untuk memberikan informasi-informasi, nilai, norma-norma serta pendidikan politik kepada masyarakat luas. Begitupula dengan PDI Perjuangan yang memiliki fungsi sebagai informan bagi masyarakat mengenai pendidikan politik. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui hubungan yang baik antara partai politik dengan masyarakat. Hubungan yang terjalin dengan baik antara masyarakat akan sangat bermanfaat bagi partai politik, kegiatan yang diadakan diluar dari kegiatan

kampanye justru lebih baik daripada banyak kegiatan yang dilakukan hanya pada saat musim kampanye saja. Tanpa harus dimobilisasi masyarakat akan tertarik dengan partai politik maupun dengan calon pasangan yang diusung oleh partai politik. Pendekatan yang dilakukan melalui kegiatan pemberian pendidikan politik dengan masyarakat akan menimbulkan simbiosis mutualisme antara masyarakat dan partai politik yang bersangkutan. Bagi partai politik, kegiatan tersebut sebagai salah satu cara untuk menarik minat masyarakat agar pada saat diadakan Pemilu maupun Pemilu masyarakat merasa memiliki kedekatan dengan partai politik tersebut. Begitu pula dengan masyarakat, mereka akan mengetahui betapa pentingnya sistem politik tersebut dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik berlandaskan pada UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PDI Perjuangan sebagai partai yang cukup berpengaruh di Kota Surakarta berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran politik bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kota Surakarta. Dengan struktur masyarakat yang terdiri dari petani maupun peternak serta pemilih pemula yang kurang lebih sebanyak 15.000 perlu diperhatikan dalam hal pendidikan politiknya. Dampak positif dari pendidikan politik yang

dilaksanakan oleh partai adalah meningkatnya partisipasi politik, kesadaran politik dan masyarakat bisa ikut berperan serta dalam proses politik.

Diadakannya pembekalan informasi terkait pendidikan politik bagi masyarakat Kota Surakarta didasarkan pada norma-norma yang sesuai dengan adat dan budaya yang ada di daerah, terutama bagi generasi muda yang dipadukan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan yang telah diraih sehingga tujuan yang diinginkan terhadap pendidikan politik ini akan mendapatkan keberhasilannya dan dimanfaatkan dengan baik dan benar serta terwujudnya partisipasi politik yang semakin meningkat. Pemilih pemula di Kota Surakarta cukup banyak yaitu sekitar 12.514 pemilih pemula (KPU Surakarta, 2019). Selain itu, masyarakatnya masih banyak yang bermata pencaharian sebagai buruh, yang berakibat pada saat pemilu masyarakat terkadang lebih mementingkan pekerjaannya daripada harus datang untuk menggunakan hak pilihnya.

Pendidikan politik yang masih kurang bagi masyarakat di Kota Surakarta yang ditunjukkan dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pada saat pilpres 2019 sebanyak 421.301 DPT dan sekitar 69.530 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan juga masih rendah, dengan kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti *public hearing* yang dilaksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat Kota Surakarta masih kurang. Maka dari itu pendidikan politik bagi masyarakat masih sangat penting dan sangat perlu dilaksanakan, terutama PDI Perjuangan sebagai partai politik yang cukup berpengaruh di Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah peran DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Surakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Surakarta?

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan observasi. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Peran DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kota Surakarta**

Peran DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Surakarta dilakukan melalui dimensi ideologis dilakukan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan yaitu UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 dan berlandaskan sesuai ideologi Pancasila. Tumbuh kembangnya demokrasi di negara ini tergantung terhadap kemampuan dan proses yang dilaksanakan oleh partai politik untuk mewujudkan pendidikan politik yang terbaik bagi kader dan para anggotanya. Di DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta mesosialisasikan dan mengkonsolidasikan

tentang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dasar negara Indonesia serta hak dan kewajiban juga tanggungjawab warga Indonesia sebagaimana yang tertera di Undang-Undang tentang Partai Politik. Dalam mensosialisasikan pendidikan politik bagi kadernya, PDI Perjuangan termasuk di DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta juga menyampaikan ideologi partai yaitu PDI Perjuangan, nilai-nilai perjuangan partai, visi dan misi partai apa yang dilakukan juga yang akan dilakukan.

Berikutnya adalah pendidikan politik melalui dimensi struktural dan prosedural, masyarakat diharapkan menjadikan politik sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan aspirasinya. Salah satu cara untuk menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah dengan sosialisasi. Dialog yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan dengan intensitas waktu yang lebih sering akan sangat mudah bagi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya politik tersebut. Peran partai politik dalam mensosialisasikan pendidikan politik terbilang sudah cukup berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya kegiatan – kegiatan seperti sekolah partai dan kegiatan pada saat bulan Bung Karno, juga kegiatan mengenai pendidikan politik yang lainnya.

Terakhir adalah pendidikan politik melalui dimensi perilaku, tujuan diadakannya sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat dan juga bagi kader partai sendiri adalah agar masyarakat dapat berperilaku politik dengan benar, sopan dan terarah yang sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan. Konsep pendidikan politik yang

disampaikan guna meningkatkan perilaku politik yang terarah, serta meningkatkan tingkat partisipatif dari masyarakat dalam kegiatan politik termasuk pada saat pesta demokrasi berlangsung. Pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat juga bertujuan untuk membangun karakter dari masyarakat agar akan lebih terbuka, rasional, kritis dan jujur dalam menanggapi keadaan politik yang terjadi. Dari tujuan pendidikan politik yang disampaikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik telah disampaikan sesuai dengan perundang – undangan, ideologi Pancasila serta ideologi partai yang ingi disampaikan kepada masyarakat juga kadernya. Sehingga kegiatan sosialisasi pendidikan politik yang sudah berjalan dapat membuahkan hasil yang terbaik apabila didukung oleh seluruh komponen yang terikat seperti dari kader partai politik, masyarakat sendiri dan juga pemerintah daerah.

## **2. Faktor-faktor yang Menghambat DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kota Surakarta**

Faktor-faktor yang menghambat DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Surakarta diantaranya adalah:

### **a. Rendahnya Minat Masyarakat dalam Mengikuti Pendidikan Politik**

Kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi tentang pendidikan politik terutama pada kalangan remaja maupun dari kader-kader partai yang terkadang masih terdapat satu ataupun dua kader

yang tingkat kesadaran politiknya masih rendah yang bisa menghambat sosialisasi tentang pendidikan politik kepada masyarakat itu sendiri. Minat kader yang kurang dan keaktifannya dalam mensosialisasikan pendidikan politik yang masih rendah bisa menghambat keterlaksanaan kegiatan ini.

Kemudian pragmatisme demokrasi saat ini, yaitu terdapat beberapa masyarakat yang tidak melihat siapa calon pemimpinnya ataupun calon legislatifnya. Tetapi berapa yang sudah diberikan calon-calon tersebut pada saat pemilu. Pola seperti ini yang terkadang masih ditemukan di masyarakat, apalagi dengan rendahnya ekonomi di daerah sangat rawan adanya kegiatan *money politic* di masyarakat. Hal-hal seperti ini yang seharusnya bisa disadarkan dengan adanya kegiatan sosialisasi pendidikan politik agar masyarakat tingkat kesadaran politiknya meningkat.

b. Terbatasnya Anggaran Dana

Kendala yang lain juga terkait dana, tidak semua daerah yang partai politik serta pemerintahannya mengucurkan dana khusus untuk sosialisasi tentang pendidikan politik kepada masyarakat. Maka daerah-daerah yang mini akan dana untuk sosialisasi pendidikan politik ini akan sangat menghambat berlangsungnya kegiatan tersebut. Serta tidak semua kader partai di daerah-daerah tertentu yang tergerak untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan politik ini karena kurang tahu akan pentingnya pendidikan politik di masyarakat.

Di Kota Surakarta sendiri dari pemerintahannya ikut serta membantu dalam masalah dana khususnya untuk pendidikan politik bagi masyarakat.



Dana yang dikucurkan dari pemerintah bagi setiap partai politik yang dananya bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan sosialisasi dalam hal pendidikan politik kurang lebih sekitar Rp 140.000.000,- per tahunnya. Dana tersebut 60% dialokasikan untuk kegiatan pendidikan politik. Kemudian sisanya untuk operasional partai. Dengan bantuan yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan pendidikan politik ini ditambah dengan dana yang dimiliki oleh masing-masing partai politik diharapkan bisa menjalankan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat luas. Diharapkan juga dengan adanya sosialisasi ini masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya politik dan bisa ikut serta didalamnya.

Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat digunakan sesuai dengan aturan pemerintahan daerah, tidak bisa semata-mata digunakan tanpa mengikuti peraturan daerah yang tersedia. Bantuan dana untuk partai politik tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 27D Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Surakarta. Bantuan dana tersebut diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Surakarta.

#### **PENUTUP**

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta mengikutsertakan berbagai kalangan, seperti para kader, generasi muda dan para pemilih pemula serta bagi calon pemimpin daerah dan maupun calon legislatif dalam kegiatan sosialisasi maupun sekolah partai yang

diadakan. Kesimpulannya bahwa pendidikan politik telah disampaikan dan dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, ideologi Pancasila serta visi dan misi partai yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga kadernya. Faktor-faktor yang menghambat DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di Kota Surakarta adalah rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti pendidikan politik dan terbatasnya anggaran dana. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta ikut serta membantu dalam masalah dana khususnya untuk pendidikan politik bagi masyarakat melalui pemberian bantuan dana hibah kepada partai politik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amal. 2012. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Anugrah, Anugerah. 2009. *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam Raja.
- H.B.Sutopo. 2005. *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.
- Indrus Affandi. 2017. *Teori dan Konsep dalam Konteks Pendidikan Politik*. Bandung: Sinar Baru Harapan.
- Maruto MD dan Anwari WMK. 2002. *Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat, Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muchamad Ali Safa'at. 2011. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Poerwantana. 2004. *Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.

- Retno Listyarti. 2012. *Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif dan Kreatif*. Jakarta: Esensi. Divisi Penerbit Erlangga.
- Rusadi Kartaprawira. 2006. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Alensindo.
- Rush dan Althoff. 2000. *Pengantar Sosiologi Politik*. Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahid, Komarudin. 2011. *Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siti Aminah. 2014. *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenadamedia.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Huku* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suharno. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- T. May Rudy. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Refika Aditama.
- Zaman, Rambe Kamarul. 2016. *Perjalanan Panjang Pilkada serentak*. Jakarta: Mizan Publika.